

## ABSTRAK

**Nina Yuliawati:** *Pengaturan dan Pelaksanaan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Pasal 27 Ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020*

Saat ini, Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan dampak yang luar biasa, baik terhadap ekonomi, stabilitas keuangan negara, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, begitu juga dengan negara Indonesia. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi polemik di masyarakat dan diajukan serta dikaji di Mahkamah Konstitusi. Polemik tersebut muncul karena dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) berpotensi menghadirkan banyaknya penumpang gelap yang dapat saja mengurus keuangan negara dengan memanfaatkan keadaan pandemi Covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum, menganalisa akibat hukum dari penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan menganalisa konsepsi pertanggungjawaban dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kerangka pemikiran Tesis ini didasarkan pada beberapa teori, yaitu teori negara hukum yang menggunakan perspektif negara hukum *rechtstaat*, teori pembentukan undang-undang yang menekankan pada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum dimana dapat menjamin kepentingan umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan landasan dalam setiap pelaksanaan tindakan pejabat negara, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang lebih menekankan pada perolehan data melalui bahan-bahan literatur hukum. Bahan-bahan tersebut diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah *pertama*, kebijakan penanganan Covid-19 berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat menyebabkan tindakan *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah. *Kedua*, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari penanganan pandemi ini berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah adanya pertentangan yang cukup signifikan dengan peraturan-peraturan lain, bahkan dengan peraturan yang lebih tinggi. *Ketiga*, konsepsi pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip negara hukum adalah adanya suatu kepastian hukum, adanya asas persamaan dalam hukum, adanya asas demokrasi, dan adanya asas pemerintahan untuk rakyat.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Pandemi Covid-19, dan UU No. 2 Tahun 2020.

## ABSTRACT

**Nina Yuliawati:** *Regulation and Implementation of Handling the Covid-19 Pandemic in Article 27 Paragraph (1-3) of Law Number 2 of 2020*

At present, the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that hit countries in the world has had a tremendous impact, both on the economy, state financial stability, social, culture, health, education, and others, as well as Indonesian country. The issuance of Perppu Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability is a polemic in the community and is proposed and reviewed in the Constitutional Court. The polemic arose because Article 27 Paragraphs (1), (2), and (3) have the potential to present many stowaways who can drain state finances by taking advantage of the Covid-19 pandemic.

The purpose of this study is to analyze the coping mechanisms for the Covid-19 pandemic based on Article 27 of Law Number 2 of 2020 in terms of the principle of legal certainty, analyze the legal consequences of handling the Covid-19 pandemic based on Article 27 of Law Number 2 of 2020, and analyzes the conception of responsibility in handling the Covid-19 pandemic in accordance with the principles of rule of law.

The framework of this thesis is based on several theories, namely the rule of law theory which uses the perspective of the state of law *rechtstaat*, the theory of the formation of laws which emphasizes the hierarchy of the formation of laws and regulations, the theory of legal certainty which guarantees the public interest, and general principles of governance. which is the basis for every action taken by state officials, especially in dealing with the Covid-19 pandemic in Indonesia.

This study uses a normative juridical method that emphasizes data collection through legal literature. These materials are processed using qualitative descriptive techniques.

Based on the results of the study, the conclusions that can be drawn are first, the policy for handling Covid-19 based on Article 27 of Law Number 2 of 2020 can lead to acts of abuse of power by the government. Second, the legal consequences that can arise from handling this pandemic based on Article 27 of Law Number 2 of 2020 are a significant conflict with other regulations, even with higher regulations. Third, the conception of accountability in accordance with the principles of a rule of law is the existence of legal certainty, the existence of the principle of equality in law, the existence of the principle of democracy, and the existence of the principle of governance for the people.

Keywords: Legal Certainty, Covid-19 Pandemic, and Law No. 2 of 2020.